



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

KIKY FAHRIZA
11775201501



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : KIKY FAHRIZA
NIM : 11775201501
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Muammar Alkadafi, S.Sos., M.si
NIK. 130 712 075

MENGETAHUI:



**DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag., MM
NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PRODI
Administrasi Negara**

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KIKY FAHRIZA
 NIM : 11775201501
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI :UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
 DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE- 19 (COVID-19) DI KOTA
 PEKANBARU

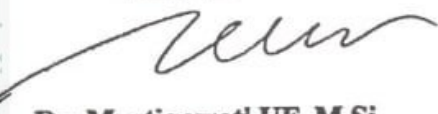
TANGGAL UJIAN : 15 Juni 2021

Disetujui Oleh:
 Ketua Penguji

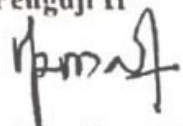

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui:

Penguji I


Dr. Mustiqowati UF, M.Si
 NIP. 197911127200801 2 010

Penguji II


Virna Museliza, SE., M.Si
 NIP. 130 712 073



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID- 19) DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Kiky Fahriza

Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dan Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui upaya pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19 di Kota Pekanbaru dan 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan konsep dari teori Ginandjar Kartasasmita (1996) mengenai Strategi pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dalam rangka pembangunan UMKM. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terbuka, observasi pasif dan studi dokumentasi di lapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 sebesar 50% lebih, sehingga pemerintah mengupayakan dalam bentuk aspek-aspek pemberdayaan berupa pelatihan, permodalan, teknologi, sarana dan prasana, pemasaran dan kemitraan. Namun yang diupayakan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru melalui pemberdayaan belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19 ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang menyebabkan belum mampu menjangkau seluruh UMKM untuk diupayakan pemberdayaan yakni karena kondisi pada masa Pandemi Covid-19 dan sumber pendanaan yang kurang.

Kata Kunci : Pemberdayaan, UMKM, Pandemi Covid-19



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

*Alhamdulillah*Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE- 19 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Almarhumah Ibunda tercinta Elyanis dan Ayahanda Tercinta Sukarno, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA).
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Untuk kakak tersayang Dyah Handayani, S.Pd dan Abang Ipar sekaligus dosen dirumah Rijalul Fikri, S.Sos., MA
 9. Untuk keluarga besar Bapak M. Yusuf Riyanto, Kak Dewi Apriani, SE yang selalu support terima kasih atas dukungannya
 10. Untuk ponakan lucu aunty Ayna Dewi Azkayra yang selalu menebarkan warna dirumah
 11. Untuk sahabat terbaik Maysi Marica, Rifqatul Umi Adzkia dan Yaumil Hasanah, Vega Sekarmiati, Lilis Mahmudah, Iin Darwati yang senantiasa menjadi teman curhat dan teman penelitan.
 12. Untuk sahabat SMK terbaik Wulan Fauzana terimakasih atas dukungannya
 13. Untuk partner bimbingan dari awal proposal sampai skripsi Jaz Marita terimakasih sudah saling menyemangati.
 14. Untuk seluruh keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2017
- Semoga semua motivasi, semangat doa serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amiin amiin ya Rabbal alamin.*

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis

KIKY FAHRIZA
NIM. 11775201501

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Fokus Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Pemerintah Daerah	13
2.1.1 Pembagian Urusan Pemerintah Dearah	17
2.2 Kebijakan Publik	19
2.2.1 Sifat Kebijakan Publik	21
2.3Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 02 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan UMKM	22
2.4 Teori Pemberdayaan	24
2.5 Teori Pemberdayaan UMKM	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	41
2.7 Pandangan Islam terhadap Pemberdayaan	44
2.8 Penelitian Terdahulu	45
2.9 Defenisi Konsep	47
2.10 Kerangka Berpikir	48
2.11 Operasional Konsep	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.2 Jenis dan Sumber Data	50
3.2.1 Jenis Penelitian	50
3.2.2 Sumber Data	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Informan Penelitian	53
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru	57
4.1.1 Administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru	58
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	59
4.2 Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	60
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	61
4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	62
4.3.1 Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Upaya Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru	65
5.1.1 Pelatihan	68
5.1.2 Permodalan	73
5.1.3 Pemberian Fasilitas	77
5.1.4 Teknologi	80
5.1.5 Pemasaran	83
5.1.6 Kemitraan	86
5.2 Hambatan dalam Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru	89

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase UMKM Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau tahun 2017	2
Tabel 1.2	Data Pertumbuhan UMKM Kota Pekanbaru tahun 2015-2019	3
Tabel 1.3	Perkembangan UMKM Perjenis Usaha tahun 2018 dan 2019.....	5
Tabel 1.4	Indeks Perekonomian Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020	7
Tabel 1.5	Jumlah UMKM Pada tahun 2020	7
Tabel 2.1	Konsep Operasional	49
Tabel 3.1	Key Informan	53
Tabel 3.2	Informan lainnya	54
Tabel 5.1	Pelaksanaan Pelatihan UMKM pada Tahun 2020	69
Tabel 5.2	Rekapitulasi tamu Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) tahun 2018, 2019 dan 2020	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru pada Tahun 2015-2019	3
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	48
Gambar 5.1	Pelatihan Teknis Keterampilan Masakan Khas Daerah	71
Gambar 5.2	Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Riil bagi Pelaku Usaha pemula se-Kota Pekanbaru	71
Gambar 5.3	Surat Izin IUMK	72
Gambar 5.4	Portal Website mataumkm	75
Gambar 5.5	Sarana Pelayanan Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yakni Klinik Konsultasi Bisnis	79
Gambar 5.6	Aplikasi Warung Segar	82
Gambar 5.7	Bazaar pada Pusat Perbelanjaan	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah di Indonesia yakni pengembangan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki kesempatan dengan adanya otonomi di daerah untuk membangun sektor perekonomian di daerah, mulai dari yang bersekala besar hingga skala yang kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Arti penting keberadaan UMKM di daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Oleh karena itu fokus terhadap UMKM menjadikannya sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah daerah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap UMKM. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan perekonomian masyarakat melalui UMKM di seluruh wilayah Riau, terlihat dari adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang spesifik mengatur dan mengurus setiap kebijakan terkait UMKM di Provinsi Riau.

Perkembangan UMKM di Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar. Pemerintah daerah Provinsi Riau menaruh prioritas dalam penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terlihat dari persebaran Usaha Mikro dan Kecil yang cukup tinggi di Provinsi Riau pada tahun 2017. Terlihat pada tabel

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau 2017

Kabupaten	Jumlah	Persentase (%)
Pekanbaru	99.175	19,47
Kampar	68.731	13,50
Siak	32.740	6,43
Pelelawan	28.145	5,53
Indragiri Hilir	44.654	8,77
Indragiri Hulu	36.316	7,13
Kuantan Singingi	30.353	5,96
Rokan Hulu	41.330	8,12
Rokan Hilir	43.152	8,47
Bengkalis	43.253	8,49
Kepulauan Meranti	15.051	2,96
Dumai	26.361	5,18
Jumlah	509.252	100

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2017*

Terlihat pada tabel 1.1 bahwasannya persebaran jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Riau yang menduduki jumlah terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah 99.175 UMK. Sehingga fenomena ini menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, sebagai salah satu daerah tingkat persebaran UMK tertinggi, Kota Pekanbaru juga menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan serta kemajuan UMK di Kota Pekanbaru. UMK yang berada di Kota Pekanbaru memiliki karakteristik atau kategorisasi jenis usaha yang beragam, yang berbeda dengan UMK lainnya di Provinsi Riau. Serta pertumbuhan UMKM yang kian bertambah setiap tahunnya dari tahun 2015-2017, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

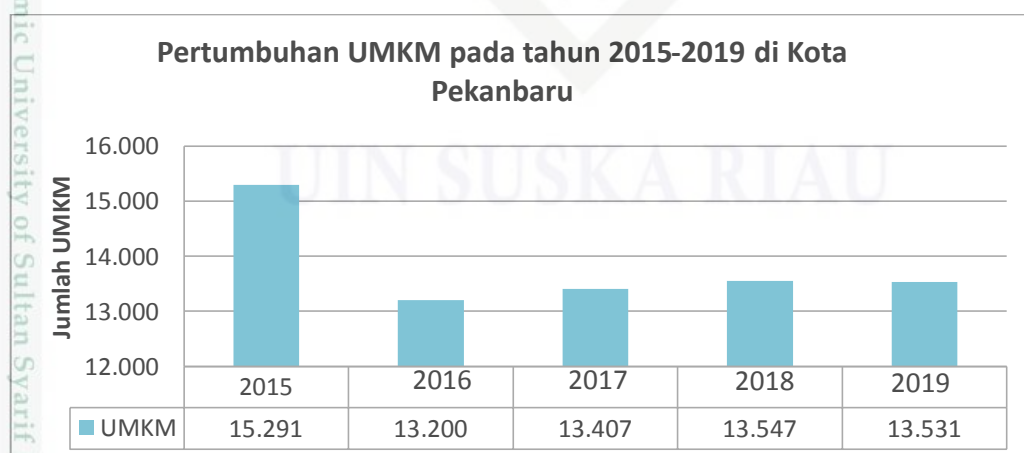
Tabel 1.2 Data Pertumbuhan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

NO	Klaster Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Mikro dan Kecil Menengah	15.291	13.200	13.407	13.547	13.531

Sumber: Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan UMKM pada tahun 2015-2019, terlihat adanya penurunan dan kenaikan dari pertumbuhan UMKM setiap tahunnya dan bahwasannya pertumbuhan UMKM bersifat dinamis atau berubah-ubah. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada jumlah UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebanyak 2.091 UMKM di Kota Pekanbaru. Lalu pada tahun berikutnya terdapat peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan kisaran kenaikan lebih kurang 150-200 UMKM setiap tahunnya. Peningkatan jumlah UMKM ini berarti menunjukkan adanya peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Pekanbaru. Namun pada tahun berikutnya yakni 2019 kembali mengalami penurunan tetapi tidak banyak yakni hanya 16 pelaku UMKM.

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan UMKM Kota Pekanbaru tahun 2015-2019.



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Kota Pekanbaru 2020

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pada tahun 2017 yang tersebar pada 12 Kecamatan adalah sebanyak 1.102 UMKM dengan rincian sebagai berikut: Kecamatan Pekanbaru Kota 32 IUMK, Kecamatan Sukajadi 46 IUMK, Kecamatan Sail 75 IUMK, Kecamatan Senapelan 301 IUMK, Kecamatan Lima Puluh 21 IUMK, Kecamatan Rumbai 48 IUMK, Kecamatan Bukit Raya 27 IUMK, Kecamatan Tampan 137 IUMK, Kecamatan Rumbai Pesisir 64 IUMK, Kecamatan Payung Sekaki 58 IUMK, Kecamatan Marpoyan Damai 47 IUMK, Kecamatan Tenayan Raya 246 IUMK. (Sumber : JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019)

Jumlah IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.102 PUMK (Pelaku Usaha Mikro Kecil) yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru yang menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat PUMK terhadap perizinan. IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi PUMK dalam mengembangkan usahanya. Jumlah tersebut berbanding jauh dari jumlah pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yang mencapai 13.407 pelaku UMKM.

Dari jumlah pertumbuhan UMKM di Kota Pekanbaru setiap tahunnya yang kian bertambah juga disertai dengan keberagaman jenis usaha UMKM yang ada di Kota Pekanbaru yang meliputi sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Perkembangan UMKM per Jenis Usaha tahun 2018 dan 2019

No	Jenis Usaha	2018	2019
1	Kuliner	4.542	4.422
2	Fashion	386	350
3	Toko Kelontong	99	73
4	Jasa dan Layanan	350	300
5	Agrobisnis	108	105
6	Teknologi Internet	113	81
7	Lainnya	7.949	8.200
Total		13.547	13.531

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2020

Dapat dilihat dari tabel 1.3 yang memperlihatkan perkembangan UMKM per jenis usaha di Kota Pekanbaru yang dimana seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, jenis UMKM pun semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan untuk semakin berkembangnya UMKM di Kota Pekanbaru dan mampu menguasai pangsa pasar dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam pasal 5 dan pasal 6 mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan. Pasal 5 tentang prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 6 tentang Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni :

- a) meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM
- b) mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- c) meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM
- d) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tanggung dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- e) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 Kota Pekanbaru turut menjadi salah satu daerah yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 yang selanjutnya disebut dengan Covid-19. Pandemi Covid-19 yang dimana mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana masyarakat dibatasi waktu dan aktivitas diluar rumah, lalu ada *social distancing* yang dimana masyarakat harus menjauhi kerumunan dan juga *physical distancing* masyarakat harus melakukan jaga jarak untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19. Keberadaan pandemi ini berdampak tidak hanya kepada kehidupan sosial masyarakat tetapi juga berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan perhitungan indeks perekonomian di Kota Pekanbaru yang mengalami kontraksi penurunan yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4 Indeks Perekonomian Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020

No	Triwulan	Kondisi Perekonomian
1	1 (Januari- Maret)	Penumbuhan 2,24 %
2	2 (April- Juni)	Penurunan 3,22 %
3	3 (Juli-September)	Penurunan 1,67%
4	4 (Oktober- Desember)	Penurunan 1,47%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel 1.4 diatas terlihat bahwasannya indeks perekonomian di Kota Pekanbaru dari periode Triwulan 2 sampai dengan 4 terus mengalami penurunan yang dimana diakibatkan karena ada nya pandemic covid-19. Tingkat penurunan ekonomi yang sangat tinggi angka kontraksi penurunan nya terjadi pada triwulan ke 2 yang dimana bertepatan pada perubahan seluruh tatanan masyarakat dikarenakan pandemic covid-19 yang dimana masyarakat dibatasi segala aktivitas nya sehingga turut berdampak besar bagi perekonomian di Kota Pekanbaru. Sektor perekonomian yang terdampak cukup besar pada pandemic ini adalah sektor UMKM. Berikut data pertumbuhan UMKM pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah UMKM pada Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Tahun	Jumlah
1	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2020	14.120

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Berdasarkan data tabel 1.5 dapat dilihat data yang di jelaskan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Pekanbaru pertumbuhan UMKM pada Tahun 2020 sebanyak 14.120 UMKM. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwasannya terdapat kenaikan jumlah UMKM dari tahun-tahun sebelumnya tetapi kenaikan itu diiringi dengan permasalahan pandemi Covid-19

yang memberikan dampak yang cukup besar kepada pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru juga mendata terdapat sebanyak 9.588 usaha UMKM di Kota Pekanbaru terdampak pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19. Jumlah tersebut lebih 50 persen dari total pertumbuhan UMKM pada tahun 2020 sebanyak 14.120 UMKM di Kota Pekanbaru.

Beberapa dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh UMKM Kota Pekanbaru menurut rangkuman dari data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru seperti, penurunan omzet yang semula mencapai 100% sebelum pandemic Covid-19 kemudian dimasa pandemi kurang dari 50%, ada beberapa usaha yang gulung tikar, selanjutnya ada juga beberapa usaha yang merumahkan pekerja nya karena tidak sanggup membayar upah. (sumber: <https://riau.antaranews.com/berita/175826/sebanyak-7888-umkm-pekanbaru-terimbas-covid-19>)

Menanggapi fenomena yang terjadi dimasa pandemi tersebut pemerintah tidak tinggal diam untuk membantu meringankan beban UMKM yang terdampak Covid-19. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pengusaha mikro yang terdampak pandemi. Di Kota Pekanbaru UMKM yang diusulkan untuk dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 9.588 UMKM yang terdiri dari 7.888 UMKM di Tahap 1 dan kemudian di tahap 2 sebanyak 1.700 UMKM.

Tidak hanya pemerintah pusat tetapi di daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru juga turut serta dalam

melakukan upaya pemberdayaan kepada UMKM yang terdampak akibat Covid-19 ini yakni akan melakukan pelatihan. Serta program-program pemberdayaan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dalam wujud untuk membantu kondisi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. Tetapi dapat dilihat bahwasannya upaya yang dilakukan pemerintah kepada UMKM dalam masa pandemi ini belum dapat dikatakan maksimal dalam membantu pemulihan kondisi UMKM dimasa Pandemi. Hal ini terlihat dengan fenomena-fenomena berikut:

- a. Daya beli masyarakat yang merosot akibat pandemi virus Covid-19. Hal itu membuat tingkat permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM turun beberapa bulan terakhir.
- b. UMKM tidak punya kemampuan untuk membiayai usahanya, karena modal usahanya habis. Sementara, tingkat permintaan di pasar merosot. Dengan demikian, UMKM kehabisan modal karena tidak ada perputaran dana.
- c. Kemampuan UMKM cenderung rendah dalam menggunakan teknologi, dan pemasaran produk UMKM juga sulit dikarenakan masyarakat enggan berbelanja dengan berkontak langsung pada Masa pandemi Covid-19 ini.
- d. Program, Kegiatan dan Kebijakan terkait pengembangan UMKM yang belum terlaksana secara efektif serta efisien terkhusus untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dalam melewati masa krisis pandemi tersebut.

Dari pemaparan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap upaya yang dilakukan pemerintah kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru pada masa Pandemi Covid-19, terutama dengan judul penelitian yaitu **Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang , maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan masukan dan melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan ke dalam penelitian ini.

2. Aspek praktis (guna laksana)

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan untuk pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

3. Aspek individual

Manfaat individual dari penelitian ini adalah menambah wawasan pengetahuan mengenai upaya pemberdayaan UMKM pada Masa Covid-19 di Kota Pekanbaru

1.5 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan dalam ruang lingkup kondisi Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 serta upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru pada Masa pandemic covid-19
2. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru

1.6 Sistematika Penulisan

1 Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang Teori-Teori yang digunakan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

4. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana upaya pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

6. Bab VI Penutup

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut (Ermaya Suradinata, 1998) mendefinisikan pemerintah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. W.S Sayre, menyebutkan “government is best defined as the organization agency of the state, expressing and exercising is authority” (pemerintahan, definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga Negara yang terorganisasi yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).

(Nawawi, 2015:18) Lebih lanjut, Ermaya Suradinata menyebutkan pemerintahan dalam arti luas adalah sebagai kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif, dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pamudji, menyebutkan pemerintahan dalam arti luas ialah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organorgan atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara (tujuan nasional). Sedangkan dalam arti sempit ialah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara. (Nawawi, 2015:19)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai negara kesatuan, Pemerintah Indonesia dibagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan atau Desa. Salah satu dari pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dalam pembagian ini terjadi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan melalui otonomi daerah. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dari uraian diatas sangat jelas UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk Implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pasal 1 butir 7 UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (9) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Menurut Sunarno Siswanto (2009:7-8) pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (11) asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2.1.1 Pembagian Urusan Pemerintah Dearah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa :

- (14) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- (15) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diseleggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut diatur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi :
 - a. Tenaga Kerja;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Kepustakaan dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian
- d. Kehutanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah di Indonesia yakni pengembangan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki kesempatan dengan adanya otonomi di daerah untuk membangun sektor perekonomian di daerah, mulai dari yang bersekala besar hingga skala yang kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Arti penting keberadaan UMKM di daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Oleh karena itu fokus terhadap UMKM menjadikannya sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah daerah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap UMKM. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan perekonomian masyarakat melalui UMKM di seluruh wilayah Riau, terlihat dari adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang spesifik mengatur dan mengurus setiap kebijakan terkait UMKM di Provinsi Riau serta salah satunya pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

2.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan secara luas dapat diartikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan

adanya konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan menurut James E. Anderson (Solichin; 2001; 2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Daru (2008;30) yang (1) Merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak (5) feedback yaitu memutuskan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat,cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2.1 Sifat Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.

4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

2.3 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun prinsip dan tujuan Pemberdayaan UMKM dalam pasal 5 dan 6 yakni:

Pasal 5 tentang Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dikerjakan dengan prakarsa sendiri.
- b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c) Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan

Pasal 6 Tujuan pemberdayaan UMKM:

- a) Meningkatkan Partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM.
- b) Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- c) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM.
- d) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai dasar pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan

Pada pasal (10) terdapat bentuk kegiatan pemberdayaan UMKM yakni:

- 1) Penguatan Permodalan
- 2) Bimbingan teknis dan penyuluhan
- 3) Pendidikan dan pelatihan
- 4) Perlindungan hukum
- 5) Advokasi
- 6) Pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan penilaian kesehatan perusahaan
- 7) Fasilitas penjaminan kredit
- 8) Fasilitas sarana dan prasarana usaha
- 9) Fasilitas pemasaran produk

- 10) Fasilitas teknologi informasi (IT)
- 11) Fasilitas kemudahan perizinan
- 12) Fasilitas atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 13) Pendampingan

2.4 Teori Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005: 57). Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah. Di sini, Suharto (2005: 58) menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam “(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”

Dalam pemberdayaan, orang miskin dan lemah tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Dengan demikian, konsep pemberdayaan

memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan dapat dipahami berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik dan sosial budaya. Sutoro Eko (2005: 150-151) misalnya, memaknai pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan sebagai subyek yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan juga dilihat sebagai upaya memberi kekuasaan sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat.

Dari sudut pandang kekuasaan, terdapat beberapa pemahaman tentang pemberdayaan sebagai berikut (Sutoro Eko, 2005: 151):

- a) Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Jim Ife, 1995).
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parros, 1994).
- c) Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).

d) Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Kartasasmita (1996: 144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Dari pengertian di atas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.

Sejalan dengan itu, Webster dalam Oxford English Dictionary (Sedarmayanti, 2000: 78) menjelaskan bahwa: Kata *empower* mengandung 2 arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable to*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pengertian pemberdayaan (Empowerment) menurut Carlzon & Macauley (Wasistiono, 1998: 46) adalah 'Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya'. Sedangkan Blancard,

et. All (1998: 113) mengemukakan bahwa “Pemberdayaan berarti anda mempunyai kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab terhadap hasilnya”.

Pemberdayaan bermakna proses sebagai akibat darimana individu memiliki otonomi, motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam satu cara yang memberikan mereka rasa kepemilikan dan pemenuhan bilamana tujuan-tujuan bersama organisasi.

Selanjutnya menurut Suharto (2005, 59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan: 1. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. 2. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sejalan dengan pendapat diatas menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Berdasarkan pendapat para pakar diatas menurut penulis pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk



melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu tindakan dalam memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah. Pemberdayaan diartikan juga sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini individu, organisasi dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi.

Secara sosiologis pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian power kepada yang powerless, karena dengan memiliki power mereka yang terhimpit dalam ketidakberdayaan akan dapat melaksanakan proses aktualisasi-eksistensi dirinya. Secara struktur, manusia memang perlu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan eksistensinya (self-actualization), karena aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia.

Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari konteks keberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya. Kartasmita (1996:144) menjelaskan, bahwa “memberdayakan masyarakat

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat”. Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sedangkan Chambers (Kartasasmita, 1996:142), menjelaskan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah ‘konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centred, participatory, dan sustainable’. Selanjutnya, Sumodiningrat (1996: 5) menyatakan bahwa: pada setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli pada masyarakat, paling tidak harus memuat lima hal pokok yakni:

“Adanya stimulan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan prasarana dan pembangunan/pengembangan kelembagaan pedesaan”.

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, Prijono (1996:73) mengemukakan sebagai berikut:

- a) Pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yaitu meliputi persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajaran. Tidak membedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama.
- b) Relevansi. Kebutuhan atau kepentingan yang tidak selamanya berjalan satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan, perbedaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan ini membuat struktur, isi, bentuk program begitu padat dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan.

- c) Kualitas. Kualitas mengacu kepada kualitas proses dan kualitas produk yang ditunjang oleh sumber daya (manusia, dan, sarana dan prasarana).
- d) Pengkoordinasian kegiatan. Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar.
- e) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Artinya pemberdayaan dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk proses pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menemui hambatan.

Dengan demikian, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan, dan juga menikmati hasil pembangunan. Sementara untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat (1999:138) mengemukakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.

- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Dalam konteks ini, Ginanjar Kartasasmita (1996:69-70) menyebutkan tiga aspek pokok yang perlu dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (encourage), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) melalui pemberian masukan (input) berupa bantuan dana, pembangunan prasarana, pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (charity),

karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat. Suharto (2005: 58) menyarankan 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal;
- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah;
- d) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya; dan
- e) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2002: 314-315) mengandung makna tiga pengertian yaitu enabling, empowering, dan maintaining sebagai berikut:

- a) Enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
- b) Empowering, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
- c) Maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat prortektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Berdasarkan penadapat Wrihantnolo dan Dwidjowijoto, Effendy dan Kartasasmita pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yaitu pertama penyadaran, kedua enabling atau capacity building, ketiga empowering dalam arti sempit dan keempat adalah protecting atau maintining.

a) Dimensi enabling atau capacity building menurut pendapat para pakar diatas pada dasarnya menciptakan susana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya dengan indikator dorongan meningkatkan produktivitas kerja, keinginan kuat untuk maju, pemenuhan kebutuhan, pemberian insentif berupa tambahan uang atau barang untuk meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gairah kerja, harapan berupa keinginan untuk penghidupan yang layak dan lebih baik, memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan inisiatif.

b) Dimensi empowering dalam arti sempit adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Indikator empowering adalah peningkatan pengetahuan tentang pembangunan, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, akses bantuan pemahaman hukum, kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, penggunaan teknologi yang lebih maju, terbukanya lapangan kerja, penyediaan informasi kerja sama dengan pihak lain, pembangunan fisik berupa jalan, dan listrik, pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan atau permodalan, ketersediaan lembaga pelatihan, pembangunan sarana perekonomian seperti pasar.

c) Dimensi protecting atau perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kelompok lemah. Indikator protecting melindungi masyarakat yang lemah, miskin, dan yang tidak mempunyai lahan, melindungi pihak yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon), melindungi kaum lemah dari berbagai bentuk pemerasan, kemudahan dan keringanan dalam membayar utang atau kredit, biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, melindungi semua pihak yang terlibat dalam program, pengaturan upah yang layak, aturan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan golongan yang lemah, aturan tidak diskriminatif, persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan seimbang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akses yang sama untuk mendapatkan informasi atau keterangan pemerintah, mencegah monopoli barang dan jasa, membentuk pergaulan antar sesama anggota masyarakat, penduduk yang tersebar menjadi memusat, penduduk yang tertutup menjadi membuka diri, meningkatkan hubungan dengan pemerintah, pemberitahuan tentang kegiatan pemerintah, menjalin komunikasi antarkelompok.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:114-115) adalah sebagai berikut:

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yakni :

- a) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian yaitu:

- a) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;
- b) Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya; dan
- c) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

2.5 Teori Pemberdayaan UMKM

Dengan mengacu beberapa pemaparan teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, maka peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memperkuat dan memberikan sebuah daya melalui kegiatan-kegiatan maupun program penguatan pengetahuan, keterampilan, agar pelaku UMKM dapat berdaya dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Melalui Ekonomi rakyat adalah ekonominya rakyat kecil yang merupakan ekonominya sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat”. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Anwas dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global menjelaskan :

“Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka perlu di bina mulai dari produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu di dorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif yang sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan”. (Anwas, 2014:125)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau UMKM berfokus pada bagaimana menciptakan inovasi dan daya saing produknya. Terlebih persaingan di arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dan perluasan area pemasaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah sebagai agen pemberdaya. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menambah nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia.

Adapun Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui strategi pengembangan ekonomi rakyat dalam pembangunan UMKM menurut Kartasasmita (1996) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, teknologi, dan manajemen.
- b) Pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- c) Kualitas produk harus ditingkatkan. Untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana yang akan memperlancar pemasaran produknya.
- d) Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan.
- e) Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat

Strategi pemberdayaan ekonomi menurut Mubyarto dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberadaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.

- b) Memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun sosial, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, dan dalam rangka memperkuat potensi ekonomi dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- c) Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat, membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan juga praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

- a) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;
- b) Aspek Permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKK);
- c) Mengembangkan Program Kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak;

- d) Pengembangan Sentra Industri Kecil Dalam Suatu Kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
- e) Pembinaan Untuk Bidang Usaha Dan Daerah Tertentu Lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan)

2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Manfaat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa manfaat penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- a) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b) Pada saat krisis moneter tahun 1998 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, lewat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- d) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah ekonomi.

2.7 Pandangan Islam Terhadap Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan aspek mualamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam al-Quran dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar- Ra'd: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi UMKM Kota Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan oleh Fitri Maliana Nugraha yang merupakan Mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Serang. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan usahanya. Adapun perbedaaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitan peneliti mengenai upaya pemberdayaan yang dilakukan pada masa pandemic covid-19 di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Maliana Nugraha Meruapakan penelitian yang berfokus pada penelitian yang mengutamakan analisis untuk mengetahui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Sementara Penelitian yang penulis buat adalah peneliti ingin melihat upaya pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi UKM di Kota Pekanbaru

3. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kecamatan Rengat Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Romauli yang merupakan Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini berfokus pada proses Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro kecil dan Menengah Kecamatan Rengat oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti ingin melihat upaya pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi UKM di Kota Pekanbaru
4. Manajemen pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan UMKM Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Egi Syahyudi yang merupakan mahasiswa Fisipol Universitas Riau. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini berfokus pada 4 (Empat) Pemberdayaan UMKM oleh Diskop dan UKM Kota Pekanbaru yakni (1) Legalitas, (2) Perkuatan Pemasaran, (3) Akses Permodalan dan (4) Pendampingan. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat upaya pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi UKM di Kota Pekanbaru.

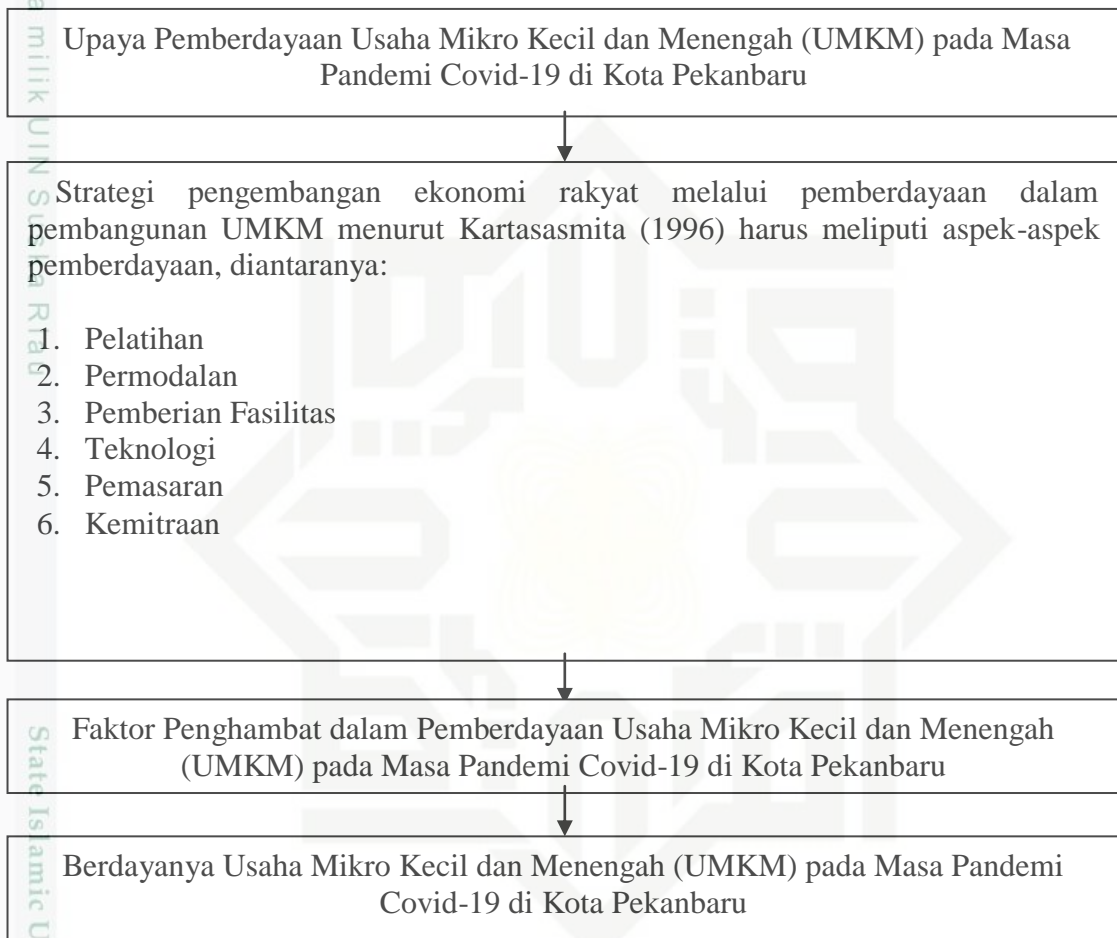
2.9 Defenisi Konsep

1. Pemerintahan Daerah adaah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kebijakan Publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat,cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.
3. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri pada suatu kelompok masyarakat.
4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah upaya dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan atau memberikan bantuan modal guna meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga terciptalah masyarakat yang mandiri dalam perekonomian.

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.

2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Ginandjar Kartasasmita (1966)

2.11 Operasional Konsep

Penulis memilih menggunakan Teori pemberdayaan menurut Ginandjar Kartasasmita (1996: 63) tentang pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang. Pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dalam pembangunan UMKM untuk melihat upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Upaya Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru (Ginandjar Kartasmita (1996))	Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas pelatihan • Durasi pelatihan
	Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Modal • Kemudahan pendanaan
	Pemberian fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana • Peralatan
	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Teknologi • Pemasaran berbasis Teknologi
	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Produk • Pangsa pasar
	Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kerja Sama • Persaingan Usaha

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dimulai dari pengajuan pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan Skripsi yang dilakukan pada bulan Maret- April tahun 2021 hingga dianggap layak untuk diujikan munaqasahkan.

3.2 Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

3.2.2 Sumber data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

a) Data primer

Data primer, Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu obeservasi berupa pendapat informan tentang Pemberdayaan

UMKM dalam masa pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi tersebut.

b) Data sekunder

Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, jurnal - jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Observasi Parsipatif Pasif

Menurut Sugiyono (2018:106-108) observasi partisipasi pasif adalah peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses dan perilaku dengan cara datang ketempat kegiatan subjek penelitian yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung dalam upaya-upaya meningkatkan penerapan, diantaranya menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting.

b) Wawancara Terbuka

Menurut Sugiyono (2018:116-117) Wawancara terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui tentang Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan.

c) Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu: informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan **teknik purposive sampling** dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Serta merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2009).

Tabel 3.1 Key Informan

No	Jabatan	Nama	Jumlah
1	Kepala Bidang Fasilitas, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Nailis Sa'adah, S.E	1
2	Seksi Promosi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Zulkarnain, S.E	1
3	Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Tarno, S.Sos., M.Si	1
4	Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru	Ernichristien N, S.H	1
5	Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi	Sri Rahayu F, S.STP	1

Tabel 3.2 Informan lainnya

No	Informan	Jumlah
1	Pelaku UMKM Kuliner	2
2	Pelaku UMKM Fashion	2
3	Pelaku UMKM Jasa dan layanan	2
4	Pelaku UMKM Toko Kelontong	2

Peneliti memilih pelaku UMKM Bidang Kuliner dikarenakan bidang kuliner saat ini sangat menjamuri di wilayah Kota Pekanbaru terlihat dari data UMKM bidang kuliner yang telah terdaftar sebanyak 208 pelaku UMKM (sumber: ukmriau.com), lalu peneliti juga memilih pelaku UMKM bidang Jasa dan Layanan dikarenakan bidang Jasa dan Layanan ini biasanya dilakukan secara langsung (berinteraksi), nah selama masa pandemi covid-19 harus menerapkan jaga jarak dan juga pembatasan jumlah konsumen, terdapat juga pelaku UMKM bidang Pakaian (Fashion) peneliti memilih bidang-bidang usaha ini dikarenakan tidak menjadi prioritas atau kebutuhan dasar masyarakat karena dimasa pandemic masyarakat cenderung memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan pelaku UMKM bidang Toko Kelontong (Retail) merupakan jenis usaha yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peneliti memilih 4 jenis bidang usaha UMKM ini karena dianggap turut menjadi usaha-usaha UMKM yang terkena dampak Covid-19.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono,2014:60).

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari

beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 45 Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik ;
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru;
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B;
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru;

4.1.1 Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah

446.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintahan Kota Pekanbaru menuju tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH”, dan motto “BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan HARMONIS”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu, **Pertama** : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi, **Kedua**: Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu, **Ketiga**: Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur Yang Baik, **Keempat**: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE), dan **Kelima** : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.2 Sejarah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor, 598/KP/X/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979. Pada tanggal 3 Januari 1981 oleh kantor kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi.

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor, 355/KP/DUI980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi kantor Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru . Pada mulanya kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27 pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

Kenyataannya berjumlah 32 orang pegawai. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada di jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, dan pada tahun 2007 - 2011 kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dibangun baru, karena Kantor Dinas Koperasi dan UKM

Kota Pekanbaru yang lama tidak layak lagi untuk dipakai, maka dibangun kantor yang baru oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan sekarang dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru berada satu atap dengan kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

Sebagaimana telah diketahui Visi dari Walikota Pekanbaru terpilih dan tercantum di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani”**, yang akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru dibagi menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan yang lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan kedalam program Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Mengembangkan Kawasan Industri.
2. Mengembangkan Pusat Perdagangan dan Jasa.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah di Kawasan Pekansikawan.
4. Mengendalikan Inflasi dan Meningkatkan Daya Beli.
5. Memperkuat Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
6. Memperkuat Lembaga Ekonomi Masyarakat.

7. Mengembangkan Kapasitas Industri Kreatif.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, yang ditunjukkan melalui pernyataan Misi Keempat yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal Pada Tiga Sektor Unggulan Yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE).**

4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

Susunan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Legalitas dan Perizinan;
 - 2) Seksi Pendapatan;
 - 3) Seksi Akuntabilitas.
- d) Bidang Promosi, Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;

3) Seksi Sarana dan Prasarana.

e) Bidang Fasilitas, Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas, membawahi :

1) Seksi Fasilitas Pembiayaan Jasa Keuangan;

2) Seksi Pengawasan;

3) Seksi Pengembangan Kapasitas.

f) Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

A. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c) penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d) pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e) pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f) pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g) pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19 di Kota Pekanbaru bahwasannya Upaya pemberdayaan sudah dilakukan oleh Pemerintah baik pusat dan juga daerah hanya saja belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM untuk mendapatkan pemberdayaan.
2. Hambatan dalam melakukan pemberdayaan dikarenakan Kondisi pada masa pandemic ini membuat segala aktivitas yang dilakukan itu sangat terbatas sehingga program-program pemberdayaan banyak yang belum terealisasi secara maksimal.
3. Sumber pendanaan juga menjadi salah satu penghambat untuk melangsungkan kegiatan pemberdayaan UMKM pada masa pandemic covid-19.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Pemerintah harus meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM pada aspek pemanfaatan teknologi seperti halnya melakukan pelatihan secara daring

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui webinar, diskusi online dan lain-lain agar upaya pemberdayaan terus berjalan tanpa harus menciptakan kerumunan pada masa pandemic covid-19

2. Perlu akses informasi yang terbuka untuk umum sehingga informasi terkait pelaksanaan segala bentuk aspek pemberdayaan mampu diketahui oleh seluruh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru berupa portal website resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.
3. Pelaku UMKM harus dapat mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi melalui pemanfaatan program-program pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah atau pihak lain seperti hal nya lebih melekat teknologi dengan menginput usaha nya pada E-Commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Mushaf Ash- Shahib. *Juz 1-30*. Bekasi : Hilal Media
- Buku:
- Ahmad, Jamaluddin. Dr. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Jakarta:
- Alkadafi. Muammar, S.Sos., M.Si. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru: CF
- Gambhir Bhatta, 2006. *International Dictionary of Public Management and Governance*, New York: M.E. Sharpe
- Hasibuan, Melayu. 2012. *Manajemen Sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Askara.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung: ITB
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga)
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: Bank Indonesia
- Mardikanto. Totok dan Poebianto. (2012) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Mulyawan. Dr. Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press
- Penerbit Gava Media
- Rakhmat, M.S. Prof. Dr. Drs. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Rusli, Zaili SD. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarundajang, H.S. 2000. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Harapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta Bandung

Suharto. Edi, (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Jurnal:

Afandi, Agung Syed dkk. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Cendawan House Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru*

Balqis. Fani. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Oleh Dinas Koperasi Ukm Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi II

Damuri, Rizal Yose dkk. 2020. *Langkah Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Covid-19*. Centre for Strategic and International Studies: JSTOR

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Romauli dkk. 2016. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Kecamatan Rengat Oleh Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Indragiri Hulu*. PUBLIKA, Vol 2, No. 2

Sugiri. Dani. 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi. Vol 19, No 1

Syahyudi. Edi. 2018. *Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Pekanbaru 2015*. JOM FISIP Vol. 5 No. 1

Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang:

Website:

Al-haura, Muthia. 2020. *Pandemi Covid-19 Hantam UMKM Keripik Nenas di Kota Pekanbaru*. <https://www.riauonline.co.id/riau/kotapekanbaru/read/220/10/2/pandemi-covid-19-hantam-umkm-keripik-nenas-di-kampar>. diakses pada 25 Nov 2020 pkl. 15.00

Edy. 2020. *Di Usia 63 Tahun, Pertumbuhan Ekonomi Riau Minus 3,2 Persen*. <https://riaulink.com/news/detail/14776/di-usia-63-tahun-pertumbuhan-ekonomi-riau-minus-32-persen>. diakses pada 25 Nov 2020 pkl. 15.15

Faizan. Eko. 2020. *Produk UMKM Kota Pekanbaru Dipasarkan di Toko Modern*.

<https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2019/204391/produkmkm-kota-pekanbaru-dipasarkan-di-toko-modern.html>, diakses pada 2 des 2020 pkl. 08.00

Frislidia. 2020. *Pekanbaru sudah kirim 9.588 data UMKM untuk dapatkan bantuan*. <https://riau.antaranews.com/berita/182145/pekanbaru-sudah-kirim-9588-data-umkm-untuk-dapatkan-bantuan>, diakses pada 24 Nov 2020 pkl. 12.00

Lusiana. Vera. 2020. *Sebanyak 7.888 UMKM Pekanbaru terimbas COVID-19*. <https://riau.antaranews.com/berita/175826/sebanyak-7888-umkm-pekanbaru-terimbas-covid-19>, diakses pada 24 Nov 2020 pkl. 11.00

Nainggolan. Edward UP. 2020. *Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13437/Peran-BUMN-dalam-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN.html>, diakses pada 02 Des 2020 pkl. 09.00

Pekanbaru.go.id. 2020. *Diskop UMKM Pekanbaru Fokus Bina Usaha Mikro*. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/diskop-umkm-pekanbaru-fokus-bina-usaha-mikro>, diakses pada 25 Nov 2020 pkl. 12.00

Salamadian. 2019. *PENGERTIAN UMKM: Ciri, Jenis, Kriteria & Contoh UMKM UKM Indonesia*. <https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia/#JenisJenisUMKM>, diakses pada 23 Nov 2020 pkl. 15.30

Wibowo. Herianto. 2020. *Dorong Peningkatan UMKM di Masa Pandemi, DPR Sosialisasi Perda UMKM*. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/61610/2020/11/23/dorong-peningkatan-umkm-di-masa-pandemi-dprd-sosialisasi-perdaumkm/#sthash.jeuZAXIQ.jTqEtZow.dpbs>, Diakses pada 24 Nov 2020 pkl. 13.00

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Seksi Pengembangan Usaha (Tanggal 04 Maret 2021)



Wawancara dengan Seksi Sarana dan Prasarana (Tanggal 04 Maret 2021)



Wawancara dengan Seksi Promosi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Kepala Bidang Fasilitas, pengawasan dan pengembangan kapasitas



Wawancara dengan Bidang Pendataan



Pelaku UMKM

Wawancara Pelaku UMKM Kuliner “Fardhan Frozen Food



Wawancara Pelaku UMKM Toko Kelontong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Pelaku UMKM Pakaian



Wawancara Pelaku UMKM Jasa dan Layanan





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi Bentuk Pemasaran Produk UMKM melalui bazaar pada pusat Perbelanjaan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tempat Penelitian Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Jl. Teratai No. 83 Kota Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Kota Pekanbaru PADA MASA PANDEMI COVID-19

a) Pelatihan

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang kondisi UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 2) Apakah ada kebijakan tentang UMKM khusus pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 3) **Bagaimana wujud perhatian pemerintah untuk kemajuan umkm** pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 4) Apakah ada kebijakan tentang pelatihan pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 5) Bagaimana bentuk jenis pelatihan yang diberikan Diskop Ukm Kota Pekanbaru dalam wujud ketahanan Pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 6) Seberapa banyak pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru yang mendapatkan pelatihan?
- 7) Seberapa lama durasi pelatihan pada Masa Pandemi covid-19 yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?
- 8) Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan pada Masa Pandemi covid-19 oleh diskop ukm Kota Pekanbaru?
- 9) Apakah sasaran terkait diadakannya pelatihan pada Masa Pandemi covid-19 kepada pelaku UMKM oleh diskop ukm dan pemerintah Kota Pekanbaru?
- 10) Apa tujuan dari pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Permodalan

- 1) Apakah ada kebijakan terkait permodalan UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimana bentuk jenis modal yang diberikan kepada pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam akses permodalan untuk pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 4) Bagaimana peran Diskop Ukm dan pemerintah Kota Pekanbaru dalam permodalan yang diberikan kepada Pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 5) Berapa kisaran modal yang diberikan atau yang diperoleh oleh pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 6) Apa yang menjadi sasaran dan tujuan diberikan nya modal kepada pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?

c) Pemberian Fasilitas

- 1) Apakah Diskop dan UKM ada memberikan fasilitas kepada UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimana bentuk fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 3) Apa yang menjadi tujuan diberikan nya fasilitas kepada pelaku UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 4) Seberapa besar pengaruh pemberian fasilitas terhadap kemajuan UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 5) Apakah ada pihak lain yang turut andil dalam penyediaan fasilitas bagi UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 6) Bagaimana tindak lanjut terkait fasilitas UMKM selama pada Masa Pandemi covid-19? apakah diberikan secara permanen atau tidak?

d) Teknologi

- 1) Apakah ada kebijakan Diskop UKM dan pemerintah Kota Pekanbaru yang mendukung pemanfaatan teknologi oleh UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Seberapa besar pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 3) Apa bentuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 4) Seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap pengembangan UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?

e) Pemasaran

- 1) Apakah ada kebijakan diskop UKM tentang pemasaran produk UMKM selama masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 2) Seberapa besar pengaruh kebijakan pemasaran terhadap pengembangan UMKM pada Masa Pandemi covid-19?
- 3) Seperti apa bentuk promosi produk UMKM pada Masa Pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Diskop UKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru?
- 4) Seberapa besar pangsa pasar dari produk UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 5) Bagaimana pendapat anda terkait pemasaran online produk UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?

f) Kemitraan

- 1) apakah ada kebijakan diskop UKM terkait Kerja sama UMKM selama pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 2) Apa bentuk kerja sama yang dibangun oleh diskop UKM terkait dengan pengembangan atau ketahanan UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 3) Bagaimana sasaran dan tujuan dari kerja sama UMKM pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 4) Seberapa besar pengaruh kerja sama dalam pengembangan UMKM selama pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?
- 5) Bagaimana pendapat anda terkait persaingan usaha pada Masa Pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru?



Daftar pertanyaan

PELAKU UMKM SEBELUM COVID-19

1. Apa pendapat anda tentang UMKM di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana wujud perhatian pemerintah untuk pelaku UMKM yang dirasakan pelaku UMKM ?
3. Bagaimana menurut anda, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru selama ini kepada UMKM?
4. Adakah pemerintah Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kepada UMKM?
5. Seperti apa saja jenis pelatihan yang diberikan?
6. Berapa durasi pelatihan yang diberikan oleh Diskop UKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada UMKM?
7. Menurut anda, seberapa besar pengaruh upaya pemerintah melalui pelatihan ini dalam pengembangan UMKM?
8. Menurut anda, bagaimana manfaat untuk usaha ataupun pelaku UMKM yang dirasakan ketika telah mengikuti pelatihan tersebut?
9. Adakah akses modal usaha yang diberikan pemerintah kota pekanbaru kepada pelaku UMKM?
10. Bagaimana bentuk dan jenis permodalan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru kepada UMKM?
11. Adakah kemudahan akses modal usaha yang diberikan pemko kepada pelaku UMKM?
12. Seberapa besar pengaruh dari permodalan yang diberikan untuk keberlangsungan UMKM di Kota Pekanbaru?
13. Adakah pemerintah Kota Pekanbaru dan Diskop UKM Kota Pekanbaru melakukan pemberian fasilitas kepada pelaku UMKM?
14. Bagaimana bentuk dan jenis pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru?
15. Menurut anda, dengan diberikan fasilitas apakah adanya manfaat yang dirasakan pada UMKM?
16. Seberapa besar pengaruh dari pemberian fasilitas yang diberikan untuk keberlangsungan UMKM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Bagaimana pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi bagi usahanya?
18. Apa bentuk dari pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh UMKM?
19. Seberapa besar pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM?
20. Seberapa besar manfaat yang dirasakan terhadap usahanya jikalau telah memanfaatkan teknologi secara maksimal?
21. Bagaimana cara memasarkan produk UMKM?
22. Apa yang anda rasakan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru tentang pemasaran?
23. Adakah wadah atau tempat memasarkan produk-produk UMKM?
24. Bagaimana menurut anda pemasaran yang dilakukan secara online?
25. Bagaimana menurut anda terkait pangsa pasar dalam memasarkan produk UMKM?
26. Bagaimana menurut anda terkait adanya persaingan dalam usaha memasarkan produk UMKM?
27. Sejauh mana pentingnya pemasaran bagi pelaku UMKM?
28. Bagaimana menjalin kerjasama antar pelaku UMKM?
29. Apa bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku UMKM untuk pengembangan usahanya?
30. Seberapa besar pengaruh dari kerja sama ini terhadap kemajuan usahanya?

Daftar pertanyaan

PELAKU UMKM PADA MASA COVID-19

1. Apa pendapat anda tentang kondisi UMKM pada masa pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana wujud perhatian pemerintah untuk pelaku UMKM yang terkena dampak pada masa pandemic Covid-19 yang dirasakan pelaku UMKM ?
3. Bagaimana menurut anda, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru selama ini kepada UMKM pada masa pandemic Covid-19?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Adakah pemerintah Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kepada UMKM selama pada masa pandemic Covid-19?
5. Seperti apa saja jenis pelatihan yang diberikan pada masa pandemic Covid-19 kepada pelaku UMKM?
6. Berapa durasi pelatihan yang diberikan oleh Diskop UKM dan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada UMKM pada masa pandemic Covid-19?
7. Menurut anda, seberapa besar pengaruh upaya pemerintah melalui pelatihan ini dalam ketahanan UMKM pada masa pandemic Covid-19?
8. Menurut anda, bagaimana manfaat untuk usaha ataupun pelaku UMKM yang dirasakan ketika telah mengikuti pelatihan tersebut terkhusus pada masa pandemic Covid-19?
9. Adakah akses modal usaha yang diberikan pemerintah kota pekanbaru kepada pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
10. Bagaimana bentuk dan jenis permodalan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru kepada UMKM pada masa pandemic Covid-19?
11. Adakah kemudahan akses modal usaha yang diberikan pemko kepada pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
12. Seberapa besar pengaruh dari permodalan yang diberikan untuk keberlangsungan UMKM pada masa pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru?
13. Adakah pemerintah Kota Pekanbaru dan Diskop UKM Kota Pekanbaru melakukan pemberian fasilitas kepada pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
14. Bagaimana bentuk dan jenis pemberian fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19 oleh pemerintah Kota Pekanbaru?
15. Menurut anda, dengan diberikan fasilitas apakah adanya manfaat yang dirasakan pada UMKM pada masa pandemic Covid-19?
16. Seberapa besar pengaruh dari pemberian fasilitas yang diberikan untuk keberlangsungan UMKM pada masa pandemic Covid-19?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Bagaimana pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi bagi usahanya selama pada masa pandemic Covid-19?
18. Apa bentuk dari pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh UMKM pada masa pandemic Covid-19?
19. Seberapa besar pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
20. Seberapa besar manfaat yang dirasakan terhadap usahanya jikalau telah memanfaatkan teknologi secara maksimal pada masa pandemic Covid-19?
21. Bagaimana cara memasarkan produk UMKM terkhusus pada masa pandemic Covid-19?
22. Apa yang anda rasakan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru tentang pemasaran pada masa pandemic Covid-19?
23. Adakah wadah atau tempat memasarkan produk-produk UMKM pada masa pandemic Covid-19?
24. Bagaimana menurut anda pemasaran yang dilakukan secara online untuk pada masa pandemic Covid-19?
25. Bagaimana menurut anda terkait pangsa pasar dalam memasarkan produk UMKM terkhusus pada masa pandemic Covid-19?
26. Bagaimana menurut anda terkait adanya persaingan dalam usaha memasarkan produk UMKM pada masa pandemic Covid-19?
27. Sejauh mana pentingnya pemasaran bagi pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
28. Bagaimana menjalin kerjasama antar pelaku UMKM pada masa pandemic Covid-19?
29. Apa bentuk kerja sama yang dilakukan pelaku UMKM untuk pengembangan usahanya pada masa pandemic Covid-19?
30. Seberapa besar pengaruh dari kerja sama ini terhadap kemajuan usahanya terkhusus pada masa pandemic Covid-19?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1267/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2021 M
5 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

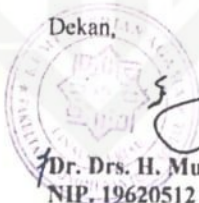
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Kiky Fahriza
NIM. : 11775201501
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Kota Pekanbaru" Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MA
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39030
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.VII/PP.00.9/1267/2021 Tanggal 17 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

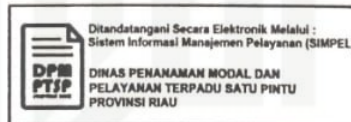
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | KIKY FAHRIZA |
| 2. NIM / KTP | : | 11775201501 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KETAHANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU
2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU
3. PLUT KUMKM PROVINSI RIAU
4. PELAKU UMKM DI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/653/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39030 tanggal 24 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : KIKY FAHRIZA
2. NIM : 11775201501
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PURNAMA BENCAH LIMBAT KEL. PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU-KAMPAR
7. Judul Penelitian : KETAHANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKANBARU
2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Februari 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Berhormat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Teratai No. 83 Telp. (0761) 21462 - PEKANBARU

Email : kumkm_pekanbaru@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/Diskop UKM-Set/ 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : WAHYU IDRIS, S.Hut, M.Si.
b. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- c. Nama : KIKY FAIRIZA
d. NIM : 11775201501
e. Kebangsaan : Indonesia
f. Asal Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU
g. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
h. Jurusan : Administrasi Negara
i. Alamat : JL. PURNAMA BENCAH LIMBAT KEL. PANDAU

Maksud : Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan judul " KETAHANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 April 2021

a.n Kepala Dinas Koperasi, UKM
Kota Pekanbaru

Sekretaris



WAHYU IDRIS, S.Hut, M.Si
NIP. 19760805 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : KIKY FAHRIZA
NIM / SMT : 11775201501
JUDUL SKRIPSI : Ketahanan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Pada masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)
di Kota Pekanbaru

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1		Judul diperbaiki	
2		RM dan TP diperbaiki	
3		Teori tentang ketahanan Teori pemberdayaan	
4		Konsep operasional (indikator) perbaiki	
5		Informan (narasumber) ditambah	
6		Analisa Data Kualitatif menurut teori siapa?	
7		Bab IV. Gambaran Lokasi penelitian diperbaiki	
8		Bab V. raiikan Data sesuai indikator	
9		Bab V. analisa Data hubungkan dengan teori yg digunakan	
10		Bab V. Data ² sekunder ¹ dan ¹ ditampilkan	
11		Bab V. penguatan analisa sesuai TP	
12		perbaiki kesimpulan dan saran	
13		Daftar Kepustakaan di lengkapi (APA)	

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu
meminta persetujuan KAJUR untuk mengikuti ujian
Skrripsi

Pekanbaru, 3/05 2021
Pembimbing I

(Muhammad Alkalafi)
NIP/NIK 30 712 075

RIWAYAT HIDUP



Kiky Fahriza, dilahirkan di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 1999. Anak dari Bapak Sukarno dan Almh. Ibu Elyanis. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SD Negeri 038 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan sekolah ke SMP Negri 25 Kota Pekanbaru lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pada sekolah ke SMK Negeri 1 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2020 penulis melakukan Pratik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada tahun 2021 penulis mengikuti seminar proposal pada tanggal 20 Januari 2021 dan Ujian Munaqasah pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Judul Skripsi ***“Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada masa Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru”*** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).